

**EFEKTIFITAS PROGRAM PENCIPTAAN 19 JUTA LAPANGAN KERJA
TERHADAP PENURUNAN PENGANGGURAN
(STUDI DATA BPS JAWA TIMUR)**

Wira Yudha Alam¹, Muchammad Dava Ramahdan², Alfi Zidan³,
Nailah Hadyan Ramadhani⁴, Yesika Fitri Aulia⁵
^{1,2,3,4,5}Manajemen FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
alfizidan24@gmail.com

ABSTRACT

Unemployment continues to be a significant macroeconomic challenge that impacts both economic stability and societal welfare. The government of Indonesia has launched a comprehensive policy aimed at generating 19 million job opportunities, bolstered by associated initiatives like the Free Nutritious Meal program, which has the potential to create jobs through the food supply sector and related industries. This research seeks to evaluate the success of the job creation initiative in lowering unemployment rates and to explore the function of the MBG program as a supplementary policy. The study utilizes a descriptive quantitative methodology, drawing from secondary information provided by the Statistics Indonesia for East Java Province, along with trend analysis and qualitative methods to evaluate indirect effects on employment. Findings suggest that job creation strategies generally aid in diminishing unemployment, though their success is affected by factors such as the quality of the labor force, the economic framework, and the distribution of jobs. The MBG initiative also demonstrates promise in generating new job prospects, but its execution needs enhancement to ensure wider and more lasting effects. Ultimately, the job creation initiative is crucial in tackling unemployment, especially when reinforced by cohesive social policies, and harmonizing policies is vital to attain effective and sustainable employment results.

Keywords: *Unemployment; Job Opportunities; MBG Program*

ABSTRAK

Pengangguran terus menjadi tantangan makroekonomi yang signifikan yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, didukung oleh inisiatif terkait seperti program Makan Gratis Bergizi (MBG), yang berpotensi menciptakan lapangan kerja melalui sektor penyediaan pangan dan industri terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif penciptaan lapangan kerja dalam menurunkan angka pengangguran dan untuk mengeksplorasi fungsi program MBG sebagai kebijakan tambahan. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif, yang diambil dari informasi sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik untuk Provinsi Jawa Timur, bersama dengan analisis tren dan metode kualitatif untuk mengevaluasi efek tidak langsung terhadap lapangan kerja. Temuan menunjukkan bahwa strategi penciptaan lapangan kerja secara umum membantu mengurangi pengangguran, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

kualitas angkatan kerja, kerangka ekonomi, dan distribusi pekerjaan. Inisiatif MBG juga menunjukkan potensi dalam menciptakan prospek pekerjaan baru, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan untuk memastikan dampak yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, inisiatif penciptaan lapangan kerja sangat penting dalam mengatasi pengangguran, terutama jika diperkuat oleh kebijakan sosial yang kohesif, dan harmonisasi kebijakan sangat penting untuk mencapai hasil ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengangguran; Lapangan Kerja; Program MBG

A. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jumlah pengangguran yang tinggi berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kemiskinan, ketimpangan, dan penurunan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, masalah ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan, karena masih ada pekerja paruh waktu dan setengah penganggur, yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih belum optimal.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya besar untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui berbagai sektor, baik formal maupun informal, termasuk memperkuat UMKM, industrialisasi, serta pengembangan ekonomi berbasis digital. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai program turunan yang memiliki potensi dalam menciptakan peluang kerja baru.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada dasarnya merupakan kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memiliki hubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, ketika program ini diterapkan, itu juga menghasilkan sektor ekonomi baru, seperti pengolahan dan pengadaan bahan pangan serta proses pengolahan makanan secara tidak langsung.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah komponen penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Pengembangan UMKM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dianggap dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, kebijakan sosial yang didasarkan pada redistribusi, seperti program bantuan pangan, memiliki potensi untuk mendorong ekonomi local

Terlepas dari fakta bahwa sejumlah penelitian telah menyelidiki kebijakan ketenagakerjaan dan pengangguran, sebagian besar penelitian telah berkonsentrasi pada penyebab umum pengangguran dan belum secara khusus menyelidiki hubungan antara program penciptaan lapangan kerja dalam skala besar dan kebijakan turunan seperti Makan Bergizi Gratis. Akibatnya, kurangnya penelitian menunjukkan bahwa analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan dalam menurunkan tingkat pengangguran diperlukan, khususnya di tingkat daerah

Berdasarkan hal tersebut, studi ini menghadirkan inovasi ilmiah

berupa analisis komprehensif yang mengevaluasi keberhasilan program penciptaan 19 juta peluang kerja dengan mempertimbangkan peranan kebijakan Makanan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi penciptaan kesempatan kerja. Penelitian ini tidak hanya menganalisis hubungan secara teoritis, tetapi juga berupaya untuk memahami interkoneksi antar kebijakan dalam konteks lapangan kerja.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah inisiatif untuk menciptakan 19 juta pekerjaan, termasuk kebijakan Makan Bergizi Gratis, dapat efektif menurunkan angka pengangguran, serta bagaimana hubungan antara kedua program tersebut dalam memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Dari permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa penciptaan pekerjaan, baik melalui metode langsung ataupun lewat kebijakan terkait, memberikan dampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana program penciptaan 19 juta pekerjaan berpengaruh dalam

mengurangi angka pengangguran, serta meneliti peran kebijakan Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu alat yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta menganalisis tingkat pengangguran berdasarkan data yang tersedia.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data tersebut berupa informasi terkait kondisi ketenagakerjaan yang meliputi tingkat pengangguran

terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah angkatan kerja, serta kondisi pekerja.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa dokumen kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan program penciptaan 19 juta lapangan kerja dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan resmi BPS, sedangkan studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Analisis Data

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur berdasarkan indikator yang tersedia. Data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk uraian untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

4.2 Analisis Tren (Time Series)

Analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui kecenderungan perubahan yang terjadi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara penciptaan lapangan kerja dengan penurunan tingkat pengangguran.

4.3 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara program penciptaan 19 juta lapangan kerja dengan kebijakan pendukung seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data yang ada serta mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

4.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Variabel independen (X): Program penciptaan 19 juta lapangan kerja

Variabel dependen (Y): Tingkat pengangguran

Variabel pendukung: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pengangguran dan Dinamika Ketenagakerjaan di Jawa Timur

Pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian sebuah wilayah karena berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia. Peningkatan kesempatan kerja sangat penting untuk mengurangi pengangguran karena secara teoritis pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang tersedia lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja yang ada. Analisis dinamika angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam konteks ini sangat penting untuk memahami perubahan kondisi ketenagakerjaan.

Tabel 1.1 Data TPAK dan TPT Jawa Timur November 2025

Periode Data	TPAK (%)	TPT (%)
Februari 2024	73,02%	3,74%
Agustus 2024	73,45%	4,19%
Februari 2025	74,25%	3,61%
Agustus 2025	73,98%	3,88%
November 2025	74,39%	3,71%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan informasi mengenai partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur antara Februari 2024 dan November 2025, tampak adanya perubahan yang cenderung stabil dengan arah perbaikan yang bertahap. TPAK meningkat dari 73,02% pada bulan Februari 2024 menjadi 74,39% pada bulan November 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak individu dalam kelompok usia kerja yang terlibat dalam dunia ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Peningkatan partisipasi ini dapat diartikan sebagai adanya stimulasi ekonomi yang cukup signifikan serta meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap peluang kerja yang ada.

Namun, pergerakan TPAK tidak selalu berjalan lurus. Contohnya, pada bulan Agustus 2025, TPAK sempat turun ke angka 73,98% sebelum kembali naik pada bulan November 2025. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan keadaan perekonomian di tingkat daerah, serta dinamika sektor informal yang cukup kuat di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik, perubahan TPAK dapat dipengaruhi

oleh aspek demografis, tingkat pendidikan, serta kondisi pasar kerja yang berdampak pada keputusan individu untuk bergabung atau meninggalkan angkatan kerja.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan variasi yang cenderung berubah-ubah namun masih dalam batas wajar. Pada bulan Februari 2024, TPT tercatat di angka 3,74%, lalu meningkat menjadi 4,19% pada bulan Agustus 2024. Kenaikan nilai ini bisa menjadi indikasi adanya tekanan di pasar tenaga kerja, mungkin disebabkan oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja. Namun, pada bulan Februari 2025, TPT mengalami penurunan menjadi 3,61%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Meskipun angkanya meningkat lagi pada bulan Agustus 2025 menjadi 3,88%, pada bulan November 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 3,71%.

Jika dianalisis secara menyeluruh, tingkat pengangguran yang berada dalam kisaran 3–4% menunjukkan bahwa situasi pengangguran di Jawa Timur cukup

minim. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas tenaga kerja telah terlibat dalam aktivitas ekonomi. Namun, angka pengangguran yang rendah tidak selamanya menggambarkan keadaan pasar kerja yang benar-benar sehat. Dalam konteks Indonesia, terutama di lokasi dengan sektor informal yang signifikan seperti Jawa Timur, banyak individu yang terlibat dalam pekerjaan nonformal dengan efisiensi dan pendapatan yang cenderung rendah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pengangguran perlu dipahami dengan cermat.

Kaitan antara TPAK dan TPT dalam data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam partisipasi angkatan kerja, ekonomi tetap dapat menyerap penambahan tenaga kerja dengan baik. Ini terlihat dari tidak adanya peningkatan yang signifikan pada TPT meskipun TPAK bertambah. Dengan kata lain, pertumbuhan dalam partisipasi tenaga kerja masih sejalan dengan penciptaan atau ketersediaan pekerjaan.

Walaupun demikian, tantangan terbesar yang muncul tidak hanya terletak pada jumlah tenaga kerja yang diserap, tetapi juga pada mutu pekerjaan yang ada. Seperti yang

sering dijelaskan dalam laporan ketenagakerjaan di tanah air, penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang cenderung memberikan jaminan kesejahteraan yang minim. Maka dari itu, meskipun indikator makro seperti TPAK dan TPT menunjukkan keadaan yang cukup baik, diperlukan analisis lebih mendalam untuk menilai kualitas pekerjaan, termasuk dari perspektif jam kerja, status pekerjaan, dan Tingkat penghasilan

Secara umum, angka TPAK dan TPT di Jawa Timur dalam jangka waktu tersebut menggambarkan bahwa lapangan kerja berada dalam keadaan yang cukup stabil dengan arah yang lebih positif. Namun, kondisi stabil ini harus didukung oleh kebijakan yang tidak hanya menekankan pada peningkatan partisipasi dan pengurangan angka pengangguran, tetapi juga berfokus pada peningkatan mutu pekerjaan agar pengaruhnya lebih terasa bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2 Data Distribusi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja November 2025

Kategori Jam Kerja	Proporsi (%)	Jumlah (Juta)
Pekerjaan Penuh (	68,88%	16,55%
Pekerjaan Paruh Waktu	25,70%	4,97%
Setengah Penganggur	5,42%	1,30%
Total Penduduk Bekerja	100%	24,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan data mengenai jumlah tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan jam kerja di Jawa Timur pada bulan November 2025, terlihat bahwa sebagian besar pekerja termasuk dalam kategori pekerja penuh (≥ 35 jam per minggu) dengan proporsi mencapai 68,88% atau sekitar 16,55 juta individu dari total 24,03 juta orang yang bekerja. Situasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja telah terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan cukup efektif, baik dari segi jumlah jam kerja maupun tingkat keterlibatan dalam proses produksi. Dalam ranah ketenagakerjaan, keberadaan pekerja penuh sering dipandang sebagai sinyal positif karena mencerminkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, pekerja penuh adalah mereka yang

berkecimpung dalam pekerjaan minimal 35 jam dalam seminggu, yang biasanya dihubungkan dengan stabilitas dalam produktivitas kerja.

Meski demikian, jumlah pekerja yang bekerja paruh waktu mencapai 25,70% atau sekitar 4,97 juta orang, menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total tenaga kerja tidak beroperasi secara optimal. Pekerja paruh waktu ini bisa mencakup mereka yang secara sadar memilih untuk bekerja dengan jam yang terbatas, namun dalam banyak situasi di Indonesia, keadaan ini lebih sering mencerminkan kurangnya kesempatan untuk pekerjaan penuh waktu. Dengan kata lain, sebagian tenaga kerja sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja lebih lama, namun belum mendapat kesempatan yang tepat. Fenomena ini sangat terkait dengan struktur pasar kerja yang masih didominasi oleh sektor informal dan jenis pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas tinggi, tetapi dengan kepastian yang rendah.

Selain itu, terdapat kelompok setengah penganggur yang berjumlah 5,42% atau sekitar 1,30 juta individu. Kelompok ini menjadi fokus utama karena meskipun secara angka

dianggap bekerja, mereka belum memanfaatkan waktu kerja mereka secara maksimal, baik dalam aspek jam kerja maupun efektivitas. Sesuai dengan pengertian dari Badan Pusat Statistik, setengah penganggur merupakan individu yang jam kerjanya kurang dari waktu kerja yang biasa dan masih aktif mencari pekerjaan tambahan atau siap untuk menerima pekerjaan lain. Situasi ini menunjukkan adanya underemployment, yaitu ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan yang tersedia.

Secara umum, meskipun angka partisipasi tenaga kerja menunjukkan angka yang signifikan (dilihat dari banyaknya pekerja penuh waktu), masih ada sekitar 31,12% dari total tenaga kerja (berupa pekerja paruh waktu dan mereka yang setengah menganggur) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efisien. Ini menandakan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada jumlah individu yang bekerja, melainkan juga pada mutu dan tingkat keterlibatan dalam pekerjaan yang ada.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa Timur, kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal, keterbatasan lapangan kerja formal, serta rendahnya keterampilan tenaga kerja di beberapa sektor. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, fenomena pekerja paruh waktu dan setengah penganggur banyak ditemukan pada sektor informal seperti perdagangan kecil, pertanian, dan jasa sederhana, yang cenderung memiliki jam kerja tidak tetap dan produktivitas yang relatif rendah.

Dengan demikian, data ini memberikan gambaran bahwa meskipun sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur telah bekerja secara penuh, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Upaya yang diperlukan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor formal agar mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal dan berkelanjutan.

**Tabel 1.3 Data Status Pekerjaan
Utama Penduduk Bekerja
November 2025**

Status Pekerjaan	Proporsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	34,69%
Berusaha Sendiri	20,27%
Berusaha Dibantu Pekerja Tak Tetap/Tak Dibayar	15,72%
pekerja Keluarga/Tak Dibayar	14,08%
Pekerja Bebas Pertanian	6,47%
Pekerja-Bebas Non-Pertanian	3,28%
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap/Dibayar	3,49%

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan informasi mengenai status pekerjaan utama masyarakat yang bekerja pada bulan November 2025, terlihat bahwa struktur tenaga kerja di Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pekerja/buruh/pegawai dengan persentase sebesar 34,69%. Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor formal mempunyai peranan yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Dari sudut pandang ekonomi ketenagakerjaan, tingginya jumlah pekerja formal biasanya terkait dengan adanya kepastian pendapatan, perlindungan bagi tenaga kerja, serta hubungan kerja yang lebih jelas antara pekerja dan majikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, kategori pekerja/buruh/pegawai merefleksikan

tenaga kerja yang bekerja untuk orang lain atau institusi dengan menerima upah atau gaji secara tetap, sehingga sering dijadikan tolak ukur dalam perkembangan sektor formal di suatu daerah.

Di sisi lain, persentase orang yang berusaha secara mandiri mencapai 20,27% menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan di Jawa Timur cukup maju. Namun, dalam banyak situasi di negara-negara berkembang, tingginya angka usaha mandiri tidak selalu menunjukkan keberhasilan dalam kewirausahaan, tetapi sering kali menjadi cara untuk beradaptasi dengan minimnya lapangan pekerjaan formal. Ini sejalan dengan teori dualisme pasar tenaga kerja yang diusulkan oleh W. Arthur Lewis, di mana sektor informal berkembang sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dan jumlah pekerjaan formal yang tersedia.

Selanjutnya, kategori yang berusaha didukung oleh pekerja tidak tetap/tidak dibayar sebesar 15,72% menunjukkan bahwa sejumlah usaha masih berukuran kecil dan belum memiliki struktur tenaga kerja yang kokoh. Situasi ini umumnya terlihat

dalam sektor usaha mikro dan kecil (UMKM), yang cenderung memanfaatkan tenaga kerja fleksibel untuk menyesuaikan dengan keadaan permintaan pasar. Berdasarkan laporan Organisasi Buruh Internasional, cara penggunaan tenaga kerja tidak tetap menjadi ciri utama sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Proporsi tenaga kerja yang tidak mendapatkan bayaran atau bekerja dalam keluarga mencapai 14,08%, yang menjadi indikator krusial adanya tenaga kerja yang tidak menerima kompensasi langsung. Situasi ini sering kali terlihat di usaha keluarga, khususnya dalam sektor pertanian dan bisnis kecil. Eksistensi pekerja yang tidak mendapatkan bayaran menunjukkan bahwa sejumlah tenaga kerja masih berada dalam kondisi yang vulnerabel, baik terkait penghasilan maupun perlindungan sosial. Berdasarkan informasi dari Bank Dunia, tingginya jumlah pekerja yang tidak dibayar berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga di negara-negara berkembang.

Sementara itu, bahagian pekerja freelance dalam sektor pertanian adalah 6,47% dan pekerja freelance di luar pertanian ialah 3,28%, menandakan wujudnya kelenturan dalam struktur pasar kerja. Pekerja bebas biasanya tidak terikat dengan kontrak formal dan bergantung pada peluang pekerjaan harian atau projek tertentu. Walaupun memberikan kebebasan dalam melaksanakan kerja, jenis pekerjaan ini sering kali mempunyai tahap ketidakpastian pendapatan yang tinggi. Ini sejalan dengan konsep kerja tidak menentu yang dijelaskan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, di mana pekerjaan yang tiada kepastian kontrak biasanya mempunyai risiko kewangan yang lebih tinggi bagi pekerja.

Terakhir, kelompok yang mencoba mendapatkan dukungan dari karyawan tetap/dibayar yaitu sebesar 3,49% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil usaha yang telah bergerak menuju status yang lebih stabil dengan tenaga kerja tetap. Porsi yang agak kecil ini menandakan bahwa peralihan usaha dari skala kecil ke arah usaha yang lebih terorganisir masih terbatas.

Secara keseluruhan, komposisi pekerjaan di Jawa Timur pada bulan November 2025 menunjukkan bahwa meskipun sektor formal memiliki pengaruh yang signifikan, sektor informal tetap berfungsi dengan sangat penting. Ini menunjukkan bahwa pasaran kerja masih belum sepenuhnya mampu menawarkan pekerjaan formal yang cukup untuk semua tenaga kerja. Maka dari itu, permasalahan utama ke depan tidak hanya berfokus pada penciptaan kesempatan kerja, tetapi juga pada usaha untuk meningkatkan mutu dan formalitas pekerjaan agar dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat.

2. Analisis Keterkaitan dengan Program Penciptaan 19 Juta Lapangan Kerja

Kebijakan pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja dapat dikaitkan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Salah satu kebijakan strategis pemerintah Prabowo–Gibran adalah program penciptaan 19 juta lapangan kerja yang bertujuan untuk

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja tidak hanya di sektor formal, tetapi juga di sektor informal dan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Pasar tenaga kerja dapat menerima jumlah pekerja yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, yang menunjukkan bahwa kebijakan penciptaan lapangan kerja mulai memengaruhi penyerapan tenaga kerja, menurut data yang dianalisis.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada hubungan langsung atau tunggal antara kebijakan penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Selain itu, dinamika sektor usaha, pertumbuhan ekonomi, dan investasi adalah beberapa faktor lain yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, program penciptaan 19 juta lapangan kerja dapat dianggap sebagai salah satu faktor pendorong yang berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

3. Peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintah juga menerapkan program pendukung seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada dasarnya merupakan kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung.

Meningkatnya tenaga kerja di bidang akomodasi dan penyediaan makanan dapat menunjukkan adanya dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan penyediaan makanan dan minuman. Mulai dari produksi bahan pangan, distribusi, hingga penyajian, program MBG dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dalam berbagai fase. Oleh karena itu, program ini memiliki efek ekonomi, yaitu menciptakan peluang kerja baru selain manfaat sosial.

Namun demikian, seberapa efektif program MBG dalam menciptakan lapangan kerja sangat bergantung pada bagaimana program diterapkan. Dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin besar jika mampu melibatkan pelaku usaha lokal dan

UMKM secara optimal. Sebaliknya, jika dilaksanakan secara tidak merata, manfaat ekonomi yang dihasilkan juga akan lebih sedikit.

4. Evaluasi Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja

Kualitas penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah, seperti yang ditunjukkan oleh proporsi pekerja formal yang relatif rendah dan bahkan sedikit menurun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih terserap ke sektor informal, yang biasanya memiliki tingkat pendapatan dan perlindungan kerja yang lebih rendah.

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya harus meningkatkan jumlah lapangan kerja, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, seperti peningkatan kemampuan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan akses ke pekerjaan formal.

5. Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi yang konsisten antara peningkatan kesempatan kerja dan

penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan jumlah orang yang bekerja dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja relatif positif.

Program penciptaan 19 juta lapangan kerja dapat dianggap sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi ini, terutama jika didukung oleh kebijakan seperti program MBG, yang memiliki kemampuan untuk mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada faktor pendukung lainnya, seperti struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan kesempatan kerja.

Dengan demikian untuk memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap penurunan pengangguran, kebijakan penciptaan lapangan kerja dan kebijakan sosial lainnya harus bekerja sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa

Timur mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang diikuti dengan penurunan angka pengangguran. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi, hal ini mencerminkan semakin dinamisnya pasar tenaga kerja.

Fakta bahwa jumlah orang yang bekerja tumbuh lebih cepat dibandingkan total angkatan kerja menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja dapat menyerap pekerja baru dengan cukup efektif. Hal ini berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan bahwa semakin banyak kesempatan kerja berkaitan dengan semakin rendahnya angka pengangguran.

Kondisi ini mungkin ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui inisiatif penciptaan lapangan kerja 19 juta yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baik di

sektor ekonomi formal maupun informal. Selain itu, kebijakan seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga membantu merangsang kegiatan perekonomian, dan secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor makanan dan minuman.

Namun, keberhasilan kebijakan penciptaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada jumlah lapangan kerja yang dihasilkan, namun juga pada kualitas lapangan kerja tersebut. Hal ini terlihat dari rendahnya proporsi pekerja formal yang menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja masih berada di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja dan mendukung sektor formal.

Secara keseluruhan, inisiatif untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja telah terbukti membantu menurunkan tingkat pengangguran, terutama bila didukung oleh kebijakan terintegrasi seperti program MBG. Oleh karena itu, kunci untuk mencapai penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal dan berkelanjutan terletak pada sinergi antara kebijakan

penciptaan lapangan kerja dan kebijakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel in Press :

Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2024

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/22/8934c883888698d7acb2e179/analisis-mobilitas-tenaga-kerja-hasil-sakernas-2024.html> (dibuka pada 19 April

2026, pukul 12.18)

Booklet Sakernas Februari 2025
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/14/90a6b20c25c63176d23ab46c/booklet-sakernas-februari-2025.html> (dibuka pada 19 April 2026, pukul 11.40)

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2025
<https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/159371d8acc29b5986c6dcd2/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-2025-.html> (dibuka pada 19 April 2026, pukul 12.19)

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur pada November 2025 mencapai 24,96 juta orang
<https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1551/jumlah-angkatan-kerja-di-provinsi-jawa-timur-pada-november-2025-mencapai-24-96-juta-orang.html> (dibuka pada 19 April 2026, pukul 11.27)

Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Februari 2025

<https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/08/19/c20307e89af5b44bf0a760ec/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-jawa-timur-februari-2025.html> (dibuka pada 19 April 2026, pukul 12.10)

Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2025 <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5ae8b994b1bebd8cbc2e0781> (dibuka pada 19 April 2026, pukul 12.13)

Jurnal :

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022, January). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. In *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), 45–53

Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1–16.

Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pane, S. G., Pramudya, W., Amalya, R. C., Aulia, S. N., & Pebriani, P. N. (2024). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1204–1214.

Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Terhadap Pola Redistribusi Sumber Daya: Tinjauan Ekonomi Politik Kabupaten Gunungkidul

Wahyuana, J. S., Agustina, S. E., Ristyadi, M. W., Agvina, F., & Sihite, J. (2026). Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Terhadap Pola Redistribusi Sumber Daya: Tinjauan Ekonomi Politik Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Society Bridge*, 4(1), 31–41.

Dinamika Pengangguran: Analisis Perubahan dalam Pasar Tenaga Kerja Nasional Syukriansyah, D., Adidjaya, F. R. G., Huda, F. F., Saputra, F. D., & Fadilla, A. (2024). Dinamika Pengangguran: Analisis Perubahan dalam Pasar Tenaga Kerja Nasional. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–7.

Evaluasi Program Bursa Kerja (Job Fair) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo Novitasari, T., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Program Bursa Kerja (Job Fair) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(2), 299–305.